

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA BARAT**
(Studi Empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017)

Rinta Seftyawati Putri*1, Sri Rahayu*2

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

rseftyawati@gmail.com*1

sriahayu@telkomuniversity.ac.id*2

Abstrak: Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan taraf hidup masyarakat. Pengalokasian besarnya belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD serta belanja modal selain itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial antara derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel dalam kurun waktu 4 tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *Eviews 9.0*. Hasil penelitian kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Secara parsial, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah, Belanja Modal.

Abstract: *Capital expenditure is an expenditure undertaken by the Government to improve the economy of the area and the livelihood of the public. Allocating capital expenditure is influenced by the magnitude of the financial performance of local government. This study aims to explain how the financial performance in the form of degrees of decentralization, regional financial independence areas, the effectiveness of the PAD, the efficiency of the financial area, and BUMD contributions and capital expenditure and to find out whether there are simultaneous and partial effect between the degrees of decentralization, regional financial independence areas, the effectiveness of the PAD, the efficiency of the financial area, and BUMD contributions on capital expenditure on district/municipality in the province of West Java 2014-2017 This study uses quantitative methods. The sampling technique used was purposive sampling. The sample in this study was 100 samples within 4 years. The analysis technique used is panel data regression analysis using Eviews 9.0. The results of the study financial performance of the degrees of decentralization, regional financial independence areas, the effectiveness of the PAD, the efficiency of the financial area, and the contribution of BUMD simultaneously have a significant effect on capital expenditure. Partially, the degrees of decentralization, regional financial independence areas, effectiveness PAD, and efficiency of financial areas has a positive effect on capital expenditure. While the degree of BUMD contributions do not affect capital expenditure.*

Keywords: *Government Financial Performance, Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada PP Republik Indonesia No.71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Sularso dan Restianto, 2011). Menurut Indiyanti (2018) belanja daerah yang lebih ditekankan pada belanja modal oleh pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Menurut penelitian Sularso dan Restianto (2011), belanja modal pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Selanjutnya, menurut penelitian Sularso dan Restianto (2011), menyatakan bahwa alokasi belanja modal pada saat penetapan besar kecilnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di pengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran (Riswan, 2014). Menurut Halim (2012), salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio tersebut nantinya menjadi tolak ukur suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya (Halim, 2012).

Derajat desentralisasi menunjukkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah, rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016:140). Rasio derajat desentralisasi menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Daling, 2013). Apabila rasio desentralisasi fiskal mengalami peningkatan berarti kinerja keuangan daerah semakin baik, sehingga pengalokasian terhadap belanja modal daerah mengalami peningkatan (Indiyanti dan Rahyuda, 2018). Hasil penelitian Arsa (2015), Praza (2016), dan Indiyanti (2018) menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Marlina et.al (2017) menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan redistribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Putra, 2016). Mahmudi (2016:140) menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintahan pusat dan provinsi serta pinjaman daerah, dimana semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Menurut Rosadi dan Suputra (2017), menyatakan bahwa

suatu daerah yang dikatakan dapat meningkatkan tingkat kemandirian dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik.

Tabel 1 merupakan hasil perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal di kabupaten dan kota pada provinsi Jawa Barat:

Tabel 1 Kemandirian Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No	Daerah	Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah	Belanja Modal
1	Kota Bandung	2014	53%	22%
		2015	57%	25%
		2016	61%	22%
		2017	82%	17%
2	Kab. Bekasi	2014	65%	31%
		2015	69%	28%
		2016	72%	27%
		2017	87%	20%
3	Kab. Bogor	2014	47%	25%
		2015	50%	26%
		2016	62%	24%
		2017	77%	22%

Sumber: data yang telah diolah (2018)

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 1 kota dan 2 kabupaten yang memiliki tingkat kemandirian daerah tiap tahun meningkat. Pada daerah tersebut memiliki kategori kemandirian yang sedang atau tinggi namun alokasi belanja modal yang dimiliki mengalami penurunan. Dimana dengan kategori kemandirian yang sedang dan tinggi berarti Pemda dapat membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah yang besar. Tetapi dengan besarnya PAD yang ada, belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah justru kecil dan setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada Permendagri No. 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD menyebutkan bahwa ketentuan mengenai besaran belanja modal ditetapkan sebesar 30% dari total belanja daerah. Selain

kecilnya alokasi belanja modal yang dikeluarkan pemerintah, bahkan alokasi yang diberikan untuk belanja modal pun masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dimana penerimaan yang ada dialokasikan ke belanja daerah selain belanja modal. Fenomena yang ada bertolak belakang dengan teori *stewardship*, teori ini menyebutkan bahwa lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa usaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan organisasi atau publik pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelolaan sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya (Eksandy et.al, 2018). Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat

(Eksandy et.al, 2018). Upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat salah satunya dengan mengalokasikan pendapatan yang ada ke belanja modal. Hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011), dan Marlina et.al (2017) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Rosadi (2017) dan Praza (2016), menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Selain itu menurut hasil penelitian Fitri (2014) dan Novianto (2015) menyatakan bahwa kemandirian keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2018:168). Efektivitas PAD merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2018:141). Efektivitas PAD dapat diukur dengan rasio efektivitas PAD. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan), semakin besar nilai rasio efektivitas maka semakin efektif kinerja pemerintah (Mahmudi, 2016). Beberapa hasil penelitian menyatakan ada perbedaan hasil dalam rasio efektivitas PAD. Menurut hasil penelitian Sularso (2011) dan Riswan (2014) menyatakan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian Arsa (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Praza (2016) bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Efisiensi adalah output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending*

well) (Mardiasmo, 2018:165). Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan, jika nilai efisiensi tinggi maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi (Fitri et al., 2014). Efisiensi keuangan daerah dapat diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah (Trianto, 2016). Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah sehingga semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya (Fitri, 2014). Menurut penelitian Martini dan Dwirandra (2015) semakin tinggi rasio efisiensi, pengeluaran daerah dalam hal ini belanja modal semakin menurun. Penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan angka rasio yang tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan itu sendiri, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah tetapi tidak digunakan secara maksimal untuk belanja modal (Martini dan Dwirandra, 2015). Terdapat perbedaan hasil penelitian pada pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Menurut hasil penelitian Riswan (2014) dan Fahd (2017) menyatakan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan menurut hasil penelitian Martini dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Fitri (2014) yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Derajat kontribusi BUMD bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah

(Indiyanti, 2018). Rasio derajat kontribusi BUMD dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan PAD (Mahmudi, 2016:143). Menurut hasil penelitian Indiyanti (2018) bahwa derajat kontribusi BUMD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, dimana kontribusi BUMD menjadi suatu sumber dari pendapatan asli daerah, sehingga tingginya derajat kontribusi BUMD diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerahnya, sehingga dengan tingginya pendapatan daerah diharapkan mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya untuk belanja modal. Serta menurut hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011) dimana derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Martini dan Dwirandra (2015) bahwa derajat kontribusi BUMD memiliki tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Selain itu menurut hasil penelitian Praza (2016) bahwa derajat kontribusi BUMD memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas dan adanya inkonsistensi penelitian terdahulu. Peneliti ingin membuktikan lebih dalam mengenai pengaruh kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi keuangan daerah, dan derajat kontribusi BUMD terhadap belanja daerah.

Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1989), *Stewardship theory* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* merupakan teori

yang memberikan gambaran tentang hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Eksandy et.al, 2018).

Belanja Modal

Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada PP Republik Indonesia No.71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Sularso dan Restianto, 2011).

Pengukuran belanja modal diformulasikan dengan total belanja modal dibagi total belanja daerah.

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan, semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Daling, 2013). Pengukuran derajat desentralisasi diformulasikan dengan membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi atau meningkatnya tingkat derajat desentralisasi setiap tahun diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal.

Hal ini didukung oleh penelitian Indiyanti (2018), Arsa (2015) dan Praza (2016) yang menunjukkan bahwa alokasi belanja modal secara positif dipengaruhi oleh derajat desentralisasi. H₂: Kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi secara parsial

berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Praza, 2016). Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah dengan dana transfer. Semakin tinggi atau meningkatnya tingkat kemandirian suatu daerah setiap tahun maka kinerja keuangannya pun semakin baik. Suatu daerah diharapkan dapat membiayai kegiatannya dan dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Sularso (2011) dan Marlina (2017) bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

H₃: Kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah selanjutnya akan disebut PAD merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membagi realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD.

Semakin tinggi atau meningkatnya tingkat efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah di daerahnya. Sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Hal ini didukung oleh penelitian Sularso (2011) dan Arsa (2015) yang menyatakan bahwa Efektivitas PAD

berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

H₄: Kinerja keuangan berupa efektivitas pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah sehingga semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya (Fitri, 2014). Efisiensi keuangan daerah dihitung dengan membagi realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.

Semakin baik tingkat efisien keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan belanja modal yang akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian, menurut hasil penelitian Riswan (2014) dan Fahd (2017) bahwa kinerja keuangan berupa efisiensi keuangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

H₅: Kinerja Keuangan berupa Efisiensi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Derajat Kontribusi BUMD

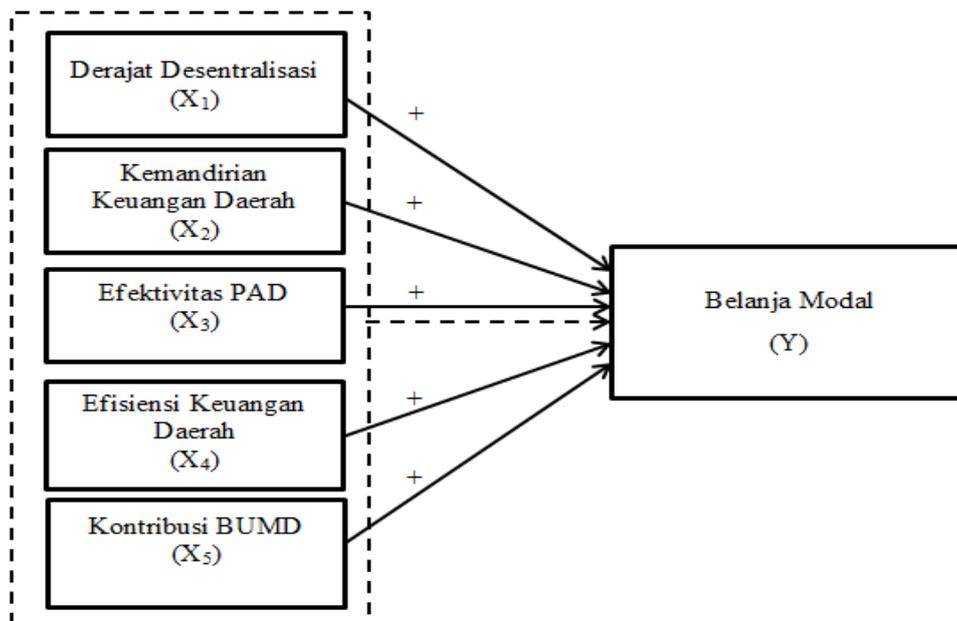
Derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah (Indiyanti, 2018). Derajat kontribusi BUMD dihitung dengan cara membagi penerimaan bagian laba BUMD dengan PAD.

Sehingga dengan semakin tinggi derajat kontribusi BUMD diharapkan meningkatkan pendapatan suatu daerah, yang nantinya pendapatan tersebut dapat membantu meningkatkan alokasi belanja modal. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian, menurut hasil penelitian yang dilakukan Sularso (2011) dan

Indiyanti (2018) menyatakan bahwa derajat Kontribusi BUMD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
 H_6 : Kinerja keuangan berupa derajat kontribusi BUMD secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas maka diperoleh model dari kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > Parsial
- > Simultan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi di dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017 sebanyak 27 Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sehingga populasi yang memenuhi kriteria *purposive sampling* adalah sebanyak 25 sampel dengan waktu penelitian selama 4 tahun, total sampel keseluruhan adalah 100 sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *software EViews 9.0*. Persamaan analisis model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 KKD_{it} + \beta_3 EPAD_{it} + \beta_4 EKD_{it} + \beta_5 DKBUMD_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- BM : Belanja Modal
- α : Konstanta
- DD : Derajat Desentralisasi
- KKD : Kemandirian Keuangan Daerah
- EPAD : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
- EKD : Efisiensi Keuangan Daerah
- DKBUMD : Derajat Kontribusi BUMD
- β : Koefisien Regresi
- e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
<i>Mean</i>	0.219523	0.308828	1.175032	0.993485	0.023193	0.213555
<i>Median</i>	0.182415	0.223118	1.150556	0.984515	0.016313	0.203057
<i>Maximum</i>	0.465000	0.869939	1.926052	1.441957	0.100368	0.665100
<i>Minimum</i>	0.060103	0.063946	0.501739	0.884838	0.003953	0.119465
<i>Std. Dev.</i>	0.107903	0.203339	0.247973	0.076513	0.019958	0.071466

Sumber: data yang diolah dengan evIEWS 9.0 (2019)

Diketahui bahwa variabel derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD dan belanja modal memiliki nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel belanja modal,

derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan derajat kontribusi BUMD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2014-2017 berkelompok atau tidak bervariasi.

Analisis Regresi Data Panel

Rumus regresi data panel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = -1,670505 + 2,555232X_1 + 0,039103X_3 + 1,056617X_5 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar -1,670505 menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan derajat kontribusi BUMD bernilai konstan, maka belanja modal (BM) yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat adalah sebesar -1,670505. Koefisien regresi derajat desentralisasi (X1) sebesar 2,555232 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan derajat desentralisasi sebesar satu satuan maka belanja modal (BM) yang dimiliki Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat akan mengalami peningkatan 2,55232. Koefisien regresi kemandirian keuangan daerah (X2) sebesar

1,107913 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan kemandirian keuangan daerah sebesar satu satuan maka belanja modal (BM) yang dimiliki Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebesar 1,107913. Koefisien regresi efektivitas PAD (X3) sebesar 0,09103 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan efektivitas PAD sebesar satu satuan maka belanja modal (BM) yang dimiliki Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebesar 0,039103. Koefisien regresi efisiensi keuangan daerah (X4) sebesar 0,39310 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan efisiensi keuangan daerah sebesar satu satuan maka belanja modal (BM) yang dimiliki Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebesar 0,39310. Koefisien regresi derajat kontribusi BUMD (X5) sebesar -1,056617 menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan derajat kontribusi BUMD sebesar satu satuan maka belanja modal (BM) yang dimiliki Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

akan mengalami penurunan sebesar 1,056617.

Uji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan uji *random effect*. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis secara simultan (uji F) dan uji hipotesis secara parsial (uji t).

Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Pengujian *Random Effect*

<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
<i>R-squared</i>	0.627429	<i>Mean dependent var</i>	-1.566639	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.387328	<i>S.D. dependent var</i>	0.286953	
<i>S.E. of regression</i>	0.224607	<i>Akaike info criterion</i>	0.140249	
<i>Sum squared resid</i>	2.270182	<i>Schwarz criterion</i>	1.067244	
<i>Log likelihood</i>	24.74067	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	0.510388	
<i>F-statistic</i>	2.613190	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.181931	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.001851			

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-1.670505	0.111054	-15.04224	0.0000
X1	2.555232	0.151899	16.82193	0.0000
X2	1.107913	0.037767	29.33566	0.0000
X3	0.039103	0.057369	0.681603	0.0499
X4	0.393810	0.069389	5.675367	0.0000
X5	-1.056617	2.784589	-0.379452	0.7061

Sumber: Output Eviews 9.5 (2019)

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3 menjelaskan hasil uji koefisien determinasi (R²), dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R-square* sebesar 0.387328 atau 38,7328%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan derajat kontribusi BUMD dapat menjelaskan belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017 sebesar 38,7328%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan derajat kontribusi BUMD terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017 secara simultan. Pada tabel 3. diketahui bahwa *prob (F-statistic)* bernilai 0,001851 < $\alpha = 5\%$ (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan derajat kontribusi BUMD secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengujian Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi, kemandirian

Pengujian Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa nilai probabilitas variabel independen kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi sebesar 0,0000. Nilai

tersebut menunjukkan bahwa $0,0000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima. Maka kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017. Nilai probabilitas variabel independen kinerja keuangan pemerintah daerah berupa kemandirian keuangan sebesar $0,0000$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,0000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima. Maka kinerja keuangan pemerintah daerah berupa kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017. Nilai probabilitas variabel independen kinerja keuangan pemerintah daerah berupa efektivitas PAD sebesar $0,0499$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,0499 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima. Maka kinerja keuangan pemerintah daerah berupa efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017. Nilai probabilitas variabel independen kinerja keuangan pemerintah daerah berupa efisiensi keuangan daerah sebesar $0,0000$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,0000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H04 ditolak dan Ha4 diterima. Maka kinerja keuangan pemerintah daerah berupa efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017. Nilai probabilitas variabel independen kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat kontribusi BUMD sebesar $0,7061$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,7061 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H05 diterima dan Ha5 ditolak. Maka kinerja keuangan pemerintah daerah berupa kontribusi BUMD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017.

Pengaruh Kinerja Keuangan Berupa Derajat Desentralisasi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 di atas, nilai probabilitas derajat desentralisasi yang diperoleh adalah sebesar $0,0000$. Hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya peningkatan atau penurunan pada tingkat derajat desentralisasi setiap tahunnya mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada alokasi belanja modal. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa 23% data yang ada mengalami peningkatan derajat desentralisasi yang diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Sedangkan 38% data yang ada mengalami penurunan tingkat derajat desentralisasi yang diikuti dengan menurunnya alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya Arsa (2015), Praza (2016), dan Indiyanti (2018) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Kinerja Keuangan Berupa Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 di atas, nilai probabilitas kemandirian keuangan yang diperoleh adalah sebesar $0,0000$. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya peningkatan atau penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah setiap tahunnya mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada alokasi belanja modal. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa 23% data yang ada mengalami peningkatan kemandirian

keuangan yang diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Sedangkan 41% data yang ada mengalami penurunan tingkat kemandirian keuangan yang diikuti dengan menurunnya alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Sularso dan Restianto (2011) dan Marlina et.al (2017) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Kinerja Keuangan Berupa Efektivitas PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas, nilai probabilitas efektivitas PAD yang diperoleh adalah sebesar 0,0499. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya peningkatan atau penurunan pada efektivitas PAD setiap tahunnya mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada alokasi belanja modal. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa 15% data yang ada mengalami peningkatan efektivitas PAD yang diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Sedangkan 33% data yang ada mengalami penurunan tingkat efektivitas PAD yang diikuti dengan menurunnya alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil Sularso (2011) dan Arsa (2015) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Kinerja Keuangan Berupa Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas, nilai probabilitas efisiensi keuangan yang diperoleh adalah sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi

keuangan berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya peningkatan atau penurunan pada efisiensi keuangan setiap tahunnya mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada alokasi belanja modal, dimana semakin efisien maka akan meningkatkan alokasi belanja daerah terutama belanja modal. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa 27% data yang ada mengalami peningkatan tingkat efisiensi keuangan yang diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Sedangkan 26% data yang ada mengalami penurunan tingkat efisiensi keuangan yang diikuti dengan menurunnya alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Riswan (2014) dan Fahd (2017) yang menyatakan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Kinerja Keuangan Berupa Derajat Kontribusi BUMD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas, nilai probabilitas derajat kontribusi BUMD yang diperoleh adalah sebesar 0,7061. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kontribusi BUMD keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya setiap peningkatan atau penurunan pada derajat kontribusi BUMD setiap tahunnya tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada alokasi belanja modal. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa 15% data yang ada mengalami peningkatan tingkat derajat kontribusi BUMD tidak diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Sedangkan 30% data yang ada mengalami penurunan tingkat derajat kontribusi BUMD tidak diikuti dengan menurunnya alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan masih ada kontribusi lain seperti pajak dan retribusi yang merupakan komponen lain dalam PAD

sehingga dapat membiayai alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Martini dan Dwirandra (2015) yang menyatakan bahwa derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian serta analisis data dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 9.5, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah dan kemandirian keuangan daerah memiliki rata-rata yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2014-2017 meningkat setiap tahunnya. Sedangkan efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, dan belanja modal memiliki nilai rata-rata yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2014-2017 berfluktuasi.

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan variabel independen kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efisiensi keuangan, dan derajat kontribusi BUMD secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2014-2017. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial

menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efisiensi keuangan berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2014-2017. Sedangkan kinerja keuangan berupa derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2014-2017.

Berdasarkan aspek teoritis untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan mencari referensi lain selain website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dalam mengambil data laporan keuangan dan memilih objek penelitian lainnya serta menambah periode penelitian. Berdasarkan aspek praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai kinerja keuangan pemerintahannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan pemerintah sehingga masyarakat ikut berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan, sehingga daerah tersebut dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsa, I. K. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 20(2), 104-112 ISSN: 1410-4628.
- Daling, M. (2013). *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA, 1(3), 82-89 ISSN: 2303-1174.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

Donadson, L., & Davis, J.H. 1989. *CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory*. Washington, DC.

Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus*

- Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015)*, 2(2), 85–94.
- Fahd, Y., & Rasyid, S. (2017). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran*. *Jurnal Analisis*, 6(2), 194–201 ISSN: 2303–100X.
- Fitri, V. K., Rasuli, M., & Silfi, A. (2014). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2009-2012*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–15.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan Daerah (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali*. *E-Journal Manajemen Unud*, 7(9), 4713-4746 ISSN: 2302-8912.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Marlina, L., Indriani, M., & Fahlevi, H. (2017). *Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)*. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(1), 21–30.
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). *Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi*. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 1–22.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2014*. Jakarta
- Praza, E. I. (2016). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 25–36. [https://doi.org/ISSN: 2338-4603](https://doi.org/ISSN:2338-4603) (print); 2355-8520 (online)
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). *Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243-256 ISSN: 2338-4603.
- Riswan, & Affandi, A. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 71–90.
- Rosadi, A. I., & Suputra, I. D. G. D. (2017). *Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum Dan SiLPA Pada Alokasi Belanja Modal*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1144-1173 ISSN: 2302-8556.
- Sularso, H., & Restianto, Y. (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. *Media Riset Akuntansi 2011*, Vol. 1 No.(1), 1–5.
- Trianto, A. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang*. *Jurnal Akuntansi Akuisis*, 12(1), 65–77.